



**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

SINTYA VARNISA
NPM 1415100362

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SINTYA VARNISA
NPM : 141510C362
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN
AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

MEDAN, 19 MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita SH., M.Hum.)

PEMBIMBING I

(Rahima bti Purba, SE., M.Si Ak., CA)

PEMBIMBING II

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : SINTYA VARNISA
NPM : 1415100362
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN
AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA

MEDAN, 19 MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI



(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

ANGGOTA - I

(Rahima br. Purba, SE., M.Si Ak., CA)

ANGGOTA - III

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM)

ANGGOTA - IV

(Drs. Mulkanuddin Ritonga, MM., Ak)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SINTYA VARNISA

NPM : 1415100362

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada unpub untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Juni 2018

Penulis



Sintya Varnisa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SINTYA VARNISA

NPM : 1415100362

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI :PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan datang .

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 Juni 2018

Penulis



Sintya Varnisa



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SINTYA VARNISA
 Tanggal Lahir : / 05 Agustus 1996
 NIM / NPM / NIDN / NIDK / NIDK : 1415100362
 Program Studi : Akuntansi
 Jurusan / Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 128 SKS, IPK 3.35
 Nama mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjal	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Tepatwaktuan Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	<input type="checkbox"/>
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan	<input type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (Ir. Bhakti Alamasyah, M.I., Ph.D.)

Medan, 22 Februari 2018

Pemohon,

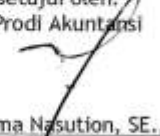
 (SINTYA VARNISA)


Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :

 (Dr. Surya Nita S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (.....)

Tanggal : 22 Februari 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (.....)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : SINTYA VARNISA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100362
 Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan peran Audit Internal terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov.Su

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9/4-2018.	Perbaiki Isi Proposal		
23/4-2018	Bab IV		
27/5-2018	Bab V		
28/5-2018	Abstrak & Kata pengantar.		
22/6-2018	Acc di sidang kan		Acc di sidang kan 22/6-2018.

Dosen Pembimbing II

Rahima Br. Purba, SE. M.Si. Ak. CA.

Medan, 22 Juni 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan




Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : *Rahima br. Purba, SE., M.Si*
Dosen Pembimbing II : *Fitri Yoni Panggabean, SE., M.Si*
Nama Mahasiswa : SINTYA VARNISA
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100362
Jenjang Pendidikan : *Strata I*
Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintah, Kompetensi Aparatur dan peran Audit Internal Terhadap kualitas Informasi laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) provinsi Sumut.*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - cover - kata pengantar (sesuai panduan) - Daftar tabel - Daftar Gambar - Spasi setiap Baris - Dilemba asing dengan menggunakan - Retensi yg dipakai menurut tahun 2008 - Penetapan penulisan sebelum - Tabel standar format Rata - Sumber utt deskripsi yg di anggap operasional - penulisan rumus matematika - Rumus lain bersumber. - Daftar pustaka (sesuai panduan) dan di urutkan sesuai abjad 		

penulisan urutannya pd daftar pustaka.

Medan, 26 Februari 2018
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahima br. Purba, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : SINTYA VARNISA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100362
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5/3-2018	Identifikasi Masalah > latar belakang masalah. wawancara Thn 2009 - 2016. kuesioner. Draft wawancara.		
6/3-2018	Bab II. & Kuesioner.		
9/3-2018	Acc Seminar keu.		

Medan, 26 Februari 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahimah br. Purba, SE., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Fitriyani Pargobean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : SINTYA VARNISA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100362
 Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh penerapan Standar Akuntansi pemerintah, Kompetensi Aparatur dan peran audit Internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Badan pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Sumut

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/03 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Kata pengantar - Daftar isi - Daftar gambar - Spasi setiap Bab - Balada atau asterisk - Penastika terdulu. - Sumber untuk deskripsi Pufici Operasi - Penalisasi Rumus persamaan Regresi linear berganda - Daftar pustaka. - Selesai abjad & referensi di pendiri unnes tahun 2000 		

Medan, 26 Februari 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1694/perpus/BP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 30 JAN 2019

UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Handwritten signature and name: Elhana, S.SOS

Medan, 28 Januari 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SINTYA VARNISA
Tempat/Tgl. Lahir : medan / 05 Agustus 1996
Nama Orang Tua : Alm.KALIDAS
N. P. M : 1415100362
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081269324855
Alamat : Jl. TB Simatupang No. 216



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Handwritten note: 28/01/2019, signed by Elhana (FM)



Diketahui/Disetujui oleh :
Dr. Surya Njita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya
SINTYA VARNISA
1415100362

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

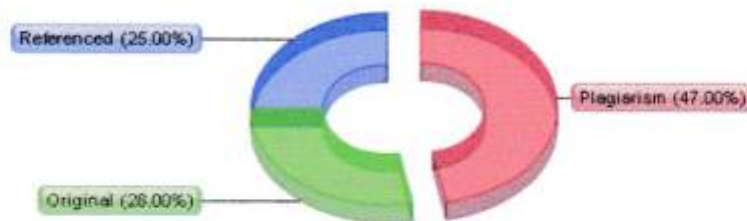
Analyzed document: 03-07-18 2:23:16 PM

"SINTYA VARNISA_1415100362_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 112	wrds: 10450	http://repository.upy.ac.id/1339/1/ARTIKEL.pdf
% 22	wrds: 2148	http://digilib.unila.ac.id/10563/16/BAB%20II.pdf
% 19	wrds: 1856	https://blognyaekonomi.files.wordpress.com/2013/06/083403158.pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

260 - Ok / 46 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

<p>Wikipedia:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p>	<p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p>
---	--	---	---

Excluded Urls:



Included Urls:



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. variabel penelitian ini sebanyak empat variabel, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah (X_1), kompetensi aparatur (X_2), peran audit internal (X_3) sebagai variabel *independent* dan kualitas informasi laporan keuangan (Y) sebagai variabel *dependent*. Jenis penelitian ini bersifat asosiatif menggunakan data primer dengan menyebarkan angket dan wawancara ke responden sebanyak 37 orang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel sensus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresilinear berganda. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini telah terbebas dari ketiga pengujian tersebut. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah memperoleh nilai sig. sebesar $0,134 > 0,05$ dan nilai $-t_{hitung} 1,537 < t_{tabel} 2,035$, sehingga penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi aparatur memperoleh nilai sig. sebesar $0,080 > 0,05$ dan nilai $-t_{hitung} 1,805 < t_{tabel} 2,035$, sehingga kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian ini menunjukkan secara parsial peran audit internal memperoleh nilai sig. sebesar $0,017 < 0,05$ dan nilai $-t_{hitung} 2,506 > t_{tabel} 2,035$, sehingga peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X_1 , X_2 dan X_3 secara simultan terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 8,465 > nilai F_{tabel} 2,92$. Sehingga secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal Dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the application of government accounting standards, apparatus competence, the role of internal audit on the quality of financial statement information at the Regional Financial Management and Asset Board (BPKAD) of North Sumatra Province. The variables of this study are four variables, namely the application of government accounting standards (X_1), apparatus competence (X_2), role of internal audit (X_3) as independent variable and quality of financial statement information (Y) as dependent variable. This type of research is associative using primary data by distributing questionnaires and interviews to respondents as many as 37 people in the Regional Financial and Asset Management Board (BPKAD) of North Sumatra Province. The sampling technique used in this research is census sampling technique. Data analysis technique used in this research is multiple regresilinear analysis technique. Tests conducted using the classical assumption test in the form of normality test, heterokedastisitas test, and multicollinearity test. The test results show that this study has been free from all three tests. The results of this test indicate that partially the application of government accounting standards obtain sig value. $0.134 > 0.05$ and the value $-t_{hitung} 1.537 < t_{tabel} 2.035$, so the application of government accounting standards have no significant effect on the quality of financial statement information. The results of this test indicate that partially the competence of apparatus get the sig value. $0.080 > 0.05$ and the value $-t_{hitung} 1.805 < t_{tabel} 2.035$, so the competence of the apparatus has no significant effect on the quality of financial statement information. The results of this test show partially the role of internal audit obtained sig value. equal to $0.017 < 0.05$ and the value $-t_{hitung} 2.506 > t_{tabel} 2.035$, so the role of internal audit significantly influence the quality of report information. And the results of this study indicate can be known significant value for the effect of X_1 , X_2 and X_3 simultaneously to Y of $0.000 < 0.05$ and the value $F_{hitung} 8.465 > value F_{tabel} 2.92$. So simultaneously the application of government accounting standards, apparatus competence, and the role of internal audit shows a significant influence on the quality of financial statement information.

Keywords: Implementation of Government Accounting Standard, Competency Apparatus, Role of Internal Audit, and Quality of Financial Statement Information

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima br.Purba, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Teristimewah ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi serta bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara (BPKAD Provsu) yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis selama peneliti.
8. Kepada sahabat-sahabatku Mutia Gusnita, Sri Kanti Br.Sagalah, Rully Dwi Yanti dan sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 27 Februari 2019
Penulis

Sintya Varnisa
1415100362

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	11
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	11
2. Kompetensi Aparatur	14
3. Peran Audit Internal	17
4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan	19
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Konseptual	24
D. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data	28
D. Definisi Operasional Variabel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Deskriptif Objek Penelitian	38

2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	43
3. Pengujian Asumsi Klasik	46
4. Pengujian Hipotesis	50
5. Analisis Regresi Linear Berganda	53
B. Pembahasan	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 22
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian 28
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 30
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas 43
Tabel 4.2	Hasil Uji Reliabilitas 45
Tabel 4.3	Uji Normalitas Data 46
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas 48
Tabel 4.5	Hasil Uji t (Uji Parsial) 50
Tabel 4.6	Hasil Uji F (Uji Simultan) 51
Tabel 4.7	Hasil Uji Determinasi 52
Tabel 4.8	Koefisien Regresi Linear Berganda 53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD	40
Gambar 4.2 Uji Normalitas Data	47
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemahaman sistem pemerintahan sedang mengalami perubahan dari sentralistik menuju desentralistik yang menyebabkan dampak terhadap suatu hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Setiap pemerintah daerah diberikan porsi kewenangan yang besar untuk dapat mengelolah keuangan daerahnya. Menurut Bennet (2010), menyatakan bahwa “Hubungan hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk penggunaan sumber daya (*input*) dengan keluaran (*ouput*) dan hasil (*outcome*) yang harusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah”.

Pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang, sekaligus dan kewajiban guna mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dalam melaksanakan proses pendelegasian wewenang antara masyarakat selaku principal dengan pemerintah daerah selaku agen. Widyananda (2008) menyatakan bahwa “Salah satu tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah menciptakan good governance yaitu dengan melakukan pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya melalui suatu proses yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel transparan serta dapat memenuhi tujuan pelayanan publik yang efektif”.

Terjadinya reformasi pada pengelolaan keuangan pemerintahan yang dikeluarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan “Bentuk serta isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah”. Dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan SAP. Dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berupa : (1) Relevan; (2) Dapat diandalkan; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami. Dalam pencapaian tujuannya pemerintah melakukan upaya dalam beberapa hal seperti peningkatan kinerja.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruwal membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kasa menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi basis akrual penuh (*full accrual*) dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Lamonisi (2016) menyatakan bahwa “penerapan basis akrual penuh (*full accrual*) terhadap pengakuan transaksi keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan”. Pemenuhan kriteria terhadap kualitas laporan keuangan menuntut agar pegawai pengelola keuangan dapat menghasilkan keuangan yang sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), diantaranya yaitu Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seorang auditor harus menyatakan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Setiyanti (2013) menyatakan bahwa “Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar atas keseluruhan dari laporan keuangan maka auditor dapat memberikan pendapat tidak penuh yaitu pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan”. Laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 hingga 2016 mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat sangat berharga bagi perbaikan kota Medan agar berusaha untuk lebih keras dan lebih serius dalam mengelola laporan keuangan daerah agar penyerahan laporan keuangan untuk tahun berikutnya dapat diserahkan tepat waktu.

Dalam memainkan perannya audit internal juga bertujuan untuk membantu meningkatkan keuntungan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga pengamanan harta, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta peningkatan efesiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar segala bentuk kebijakan-kebijakan atau ketentuan peraturan pemerintah yang

berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah. Audit internal juga merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan proses *governance*.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang sehat serta menciptakan *good governance* juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang berkompeten. Namun masih sering terjadi permasalahan yang umum dalam instansi pemerintah daerah untuk penataan personil, sering tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Inaty dan Martiningsih (2016) menyatakan bahwa “Kualitas laporan keuangan BPKAD dapat meningkat jika sumber daya manusianya memiliki kompeten terhadap pengelolaan laporan keuangan”. Sering terjadi keterlambatan dalam membuat laporan keuangan dan juga sering terjadi ketidak sesuai dalam laporan keuangan dikarenakan keterlambatan dalam menginput laporan setiap bulannya. Karena BPKAD sebagai pembuat laporan keuangan adalah hasil konsolidasi dari seluruh OPD (organisasi perangkat daerah). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap orang aparatur baik berupa pengetahuan, kerampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya.

Keuangan Negara diwajibkan dikelola oleh aparatur Negara yang berkompeten secara tertib taat terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai persyaratan dalam mendukung keberhasilan

penyelenggaraan pemerintah Negara. Dalam mewujudkan hal tersebut instansi memerlukan sistem pengendalian Intern yang kuat dan peran dari audit intern itu sendiri agar dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya dapat meningkatkan laporan keuangan BPKAD. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan atau kegiatan yang harus dilakukan terus menerus oleh pimpinan maupun seluruh pegawai agar dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset Negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Dari hal yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang saling berpengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur serta Peran Audit internal dibutuhkan dalam rangka pengelolaan keuangan, yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Taswan (2010) menyatakan bahwa “Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan yang untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja, atau seluruh informasi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan”.

Dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kompetensi aparatur. Moeheriono (2009) menyatakan bahwa “kompetensi aparatur merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang. Dan dapat dievaluasi oleh seorang audit internal secara objektif untuk menetapkan suatu kewajaran laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal diatas, maka penulis tertarik untuk membahas serta membuat suatu tulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun indentifikasi masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut :

- a. Sering terjadi keterlambatan dalam menginput laporan keuangan sehingga tidak memiliki kompetensi yang baik dan banyak laporan yang tidak sesuai dikarenakan keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan.
- b. Terdapat hubungan yang saling berpengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan keuangan.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada variabel Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Peran Audit Internal secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan saran yang berguna kepada BPKAD Provinsi Sumatera Utara mengenai kualitas informasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat berjalan dengan efektif.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahida N (2015), Universitas Hasanuddin “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara”. Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Variabel Penelitian : penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X_1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X_2), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), Peran Audit Internal (X_3), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).
2. Wilayah penelitian : wilayah penelitian terdahulu di Kabupaten Konawe Utara, sedangkan wilayah penelitian ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
3. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015. Sedangkan penelitian ini tahun 2018.
4. Perbedaan variabel penelitian, wilayah penelitian dan waktu penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi : “Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat 8 (delapan) prinsip akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja berbasis kas diakui setelah diotorisasikan melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dengan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga diajarkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode-periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah ini sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan untuk menghindari timbulnya

implikasi negatif tentang rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pengauditan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan-laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

2. Kompetensi Aparatur

a. Pengertian Kompetensi

Wibowo (2008) menyatakan bahwa “Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Moeheriono (2009) mengungkapkan “Kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

b. Jenis Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 69 UU no 5 tahun 2014 ayat (1) meliputi :

- 1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman berkerja secara teknis;

- 2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- 3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Dalam kompetensi juga terdapat beberapa komponen utama pembentuk kompetensi, yaitu :

- a) Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan.
- b) Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan berkerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok.
- c) Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem diklat berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- (1) Berorientasi pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan;
- (2) Mendorong peningkatan kinerja organisasi dan perkembangan karier aparatur;
- (3) Berbasis pada kompetensi kerja penyelenggaraan pemerintah;
- (4) Tanggung jawab bersama antara aparatur, pemerintah, dan masyarakat;
- (5) Bagian dari perkembangan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan; dan
- (6) Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

c. Pengertian Aparatur

Aparatur menurut kamus besar bahasa Indonesia (2015) aparatur adalah perangkat pemerintah para pegawai negeri atau alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Aparatur memiliki tugas pokok yaitu :

- (a) Perencanaan program pengawasan merupakan suatu perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- (b) Fasilitas pengawasan sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan.
- (c) Pemeriksaan, pengurusan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan merupakan pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dari pelaporan.
- (d) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan merupakan tugas audit.

3. Peran Audit Internal

Audit internal terdapat dalam perusahaan yang relatif besar dimana pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian seksi, atau satuan organisasi yang lain. Diantaranya adalah hotel yang memiliki banyak departemen, serta bagian-bagian yang lainnya untuk menjalankan segala aktifitas yang ada di hotel. Bila perusahaan terdiri dari beberapa departemen maka pimpinan dapat mendelegasikan wewenang pada kepala-kepala unit operasi tersebut.

Audit internal mempunyai tujuan yaitu membantu meningkatkan keuntungan perusahaan melalui saran-saran yang objektif dan bermutu dan juga pengamanan harta perusahaan, penyajian data yang akurat dan reliabel, serta peningkatan efisiensi perusahaan maupun mendorong ditetapkannya secara benar segala bentuk kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kelangsungan hidup dan kemajuan pemerintah.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) “Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance*”.

a. Jenis Audit

Jenis audit terdiri dari tiga macam yaitu :

1) Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audits*)

Audit Laporan Keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria

tertentu tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Audit Laporan Keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan dan data yang berasal dari sumber-sumber diluar. Pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan independent tersebut biasanya untuk pihak *ekstern*, seperti analisis keuangan, kreditor, *supplier*, investor dan pemerintah.

2) Audit Operasional (*Operational Audits*)

Adapun Audit Operasional karakteristik sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai efektivitas suatu unit atau fungsi.
- b) Pengukuran efektivitas didasarkan pada bukti – bukti dan standar pemerintah.
- c) Sifatnya investigatif.
- d) Obyek pemeriksaan meliputi semua aspek operasi keuangan.
- e) Operasional audit dapat ditujukan untuk keseluruhan atau salah satu departement dari suatu perusahaan.

Audit laporan keuangan dan audit operasional adalah pada tujuan pengujian. Audit laporan keuangan menekankan apakah informasi laporan keuangan disajikan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan Audit operasional menekankan pada ekonomisasi, efesiensi, dan efektivitas yang mencakup beranekaragam aktivitas yang luas, yang berhubungan

dengan performa yang akan datang. Audit operasional dapat dilakukan oleh Internal Auditor, Akuntan Pemerintah dan Kantor Akuntan Publik.

3) Audit Kepatuhan (*Compliance Audits*)

Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti kebijakan prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otorisasinya lebih tinggi. Tanggung jawab auditor adalah menguji dan melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bervariasi sesuai dengan syarat perikatan. Auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama untuk memastikan bahwa auditor dan manajemen memahami tipe perikatan yang harus dilaksanakn auditor. Informasi terukur dalam audit kepatuhan misalnya, data mengenai pelaksanaan kebijakan, peraturan, prosedur, pengangkatan, pengupahan, pemberhentian pegawai, pelaporan SPT pajak dan pelaksanaannya.

4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang menunjukkan kinerja dari Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam mengelola organisasi yang ada dibawah kepemimpinannya. Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur berbasis kadar ketidakpastian dan dicapai melalui pemeriksaan. Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Pada hakekatnya, laporan keuangan digunakan penggunaannya untuk pengambilan keputusan serta mengadakan evaluasi atas sumber daya yang digunakan.

Kualitas laporan keuangan daerah diartikan sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode

merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut.

Informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh sebab itu, keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna, namun disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan dapat berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan satu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen. Pernyataan SAP hanya berlaku untuk laporan keuangan dan bukan untuk informasi lainnya yang disajikan dalam suatu laporan tahunan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Karakteristik laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

a. Relevan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil koreksi masa lalu. Dengan demikian informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Adapun informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback*)
- 2) Memiliki manfaat prediksi (*Predictive Value*)
- 3) Tepat waktu (*Timeliness*)
- 4) Lengkap (*Completeness*)

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial akan menyesatkan, informasi yang andal harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netralitas

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan diperiode sebelumnya atas laporan keuangan lainnya.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para penggunanya dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan istilah yang

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna yang diasumsikan memiliki pengetahuan atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

Pentingnya kualitas dari laporan keuangan akan berguna untuk memudahkan pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi. Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kewajiban. Kualitas laporan keuangan daerah akan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator dari laporan keuangan daerah yang berkualitas adalah dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut referensi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Angga Dwi Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

2	Ruri Widiastuti (2013)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi 2. Sistem Pengendalian Internal 	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3	Wahida N (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah 	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe Utara.

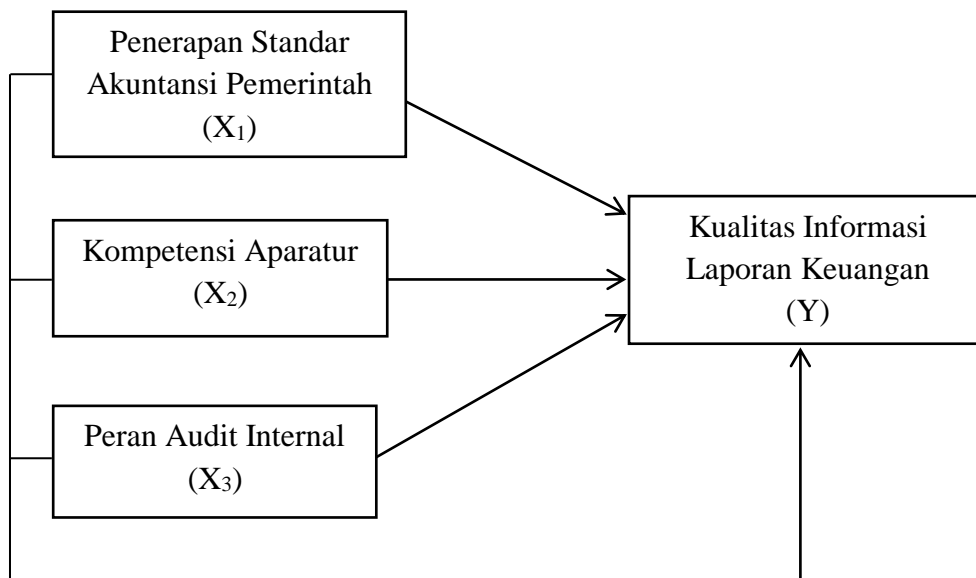
Sumber: Penulis, 2018

C. Kerangka Konseptual

Peraturan Permerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Renyowijoyo (2008) menyatakan “Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Menurut Moehariono (2009) mengungkapkan “Kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) “Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance*”.

Taswan (2010) menyatakan bahwa “Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan yang untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja, atau seluruh informasi yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan”. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi bila diubah kedalam konteks yang memberikan makna. Dan Kualitas laporan keuangan daerah

diartikan sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyedia laporan keuangan daerah harus menyediakan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah pemerintah memerlukan suatu standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini maka ada hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dantes (2012) menyatakan bahwa “Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang diperkirakan secara fakta diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk data atau pertanyaan yang dapat diuji”. Dari pengertian tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
2. Kompetensi Aparatur berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
3. Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal berpengaruh secara simultan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada metode penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat asosiatif, yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu peristiwa (Rusiadi, et al,2013:14). Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan P. Diponegoro No. 30 Telp. 4156000, Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2018 – Februari 2019, dengan format pada tabel 3.1 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli		Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																										
2	Penyusunan Proposal																										
3	Seminar Proposal																										
4	Perbaikan Proposal																										
5	Pengolahan Data																										
6	Penyusunan skripsi																										
7	Bimbingan skripsi																										
8	Sidang meja hijau																										

Sumber : Penulis, 2019

C. Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

1. Populasi

Menurut Ghozali (2013) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sejumlah 37 responden.

2. Sampel

Menurut Ghozali (2013) “Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Dalam penentuan sampel penelitian ini saya menggunakan teknik sampel sensus hal ini dikarenakan jumlah responden dibawah 100 (Ghozali, 2013). Sampel sensus digunakan apabila jumlah populasi dibawah 100 dengan menarik

seluruh populasi untuk dijadikan sampel di dalam. Sehingga sampel di dalam penelitian saya berjumlah 37 responden.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari sumber data primer. Yang dimana data primer memiliki definisi data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Pada pegawai bagian Akuntansi (14 pegawai), Anggaran (6 pegawai), Kas (10 pegawai) dan Aset (7 pegawai) di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Kompetensi Aparatur (X_2), Peran Audit Internal (X_3) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dari suatu faktor lainnya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1)	1. Basis akuntansi 2. Prinsip nilai 3. Prinsip realisasi 4. Prinsip substansi mengungguli	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang	Likert

		<ul style="list-style-type: none"> 5. bentuk formal 6. Prinsip periodisitas 7. Prinsip konsistensi 7. Prinsip pengungkapan lengkap <p>Sumber: PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah</p>	<p>diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.</p> <p>Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Renyowijoyo (2008)</p>	
2.	Kompetensi Aparatur (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan berpikir 2. Memahami pekerjaan dengan baik 3. Kemampuan merencanakan 4. Kemampuan berkerja sama dengan kelompok 5. Kemampuan mengendalikan diri 6. Komitmen terhadap pekerjaan 7. Inisiatif <p>Sumber: Prayitno (2003) Dalam Maarif (2003)</p>	<p>Kompetensi aparatur merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.</p> <p>Sumber: Moeheriono (2009)</p>	Likert
3.	Peran Audit Internal (X ₃)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Independensi 2. Kemampuan profesional 3. Lingkup pekerjaan 4. Pelaksanaan kegiatan 5. Bagian pemeriksa keuangan <p>Sumber: Herry (2010) Dalam Tugiman (2006)</p>	<p>Audit Internal adalah kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses <i>governance</i>.</p>	Likert

			Sumber: Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004)	
4.	Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaporan 2. Pencatatan transaksi 3. Mengumpulkan data 4. Penggolongan transaksi untuk penyajian 5. Menyajikan informasi 6. Memiliki kualitas kualitatif 7. Dapat dipahami 8. Andal 9. Dapat dibandingkan 10. Relevan <p>Sumber: PP Nomor 71 Tahun (2010,) Harahap (2008)</p>	<p>Kualitas informasi laporan keuangan adalah proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode merupakan bentuk pertanggungjawab pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.</p> <p>Sumber: Permana (2011)</p>	Likert

Sumber: Penulis, 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis membuat sejumlah bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan menggunakan skala likert dengan *checklist*.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mencermati dokumen-dokumen yang ada. Teknik ini dimaksudkan

untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar dan memperoleh gambaran nyata mengenai kegiatan yang dilakukan.

3. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari tangan pertama dan untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner atau angket merupakan penelitian yang dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Untuk menguji validitas dari pertanyaan kuisisioner digunakan rumus korelasi *rank spearman*. Korelasi *rank spearman* digunakan apabila data untuk kedua variabel yang akan diuji dapat berasal dari sumber yang tidak sama, jenis data berupa data likert. Sugiono (2012), menyatakan bahwa “Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total yang dihasilkan oleh masing - masing responden dengan skor masing - masing pertanyaan.

Pertanyaan atau kuisisioner dapat dinyatakan valid jika skor total menunjukkan korelasi lebih besar ($>$) 0.30 atau lebih. Pertanyaan penelitian ini juga

dapat dinyatakan valid apabila mempunyai nilai r hitung lebih besar dari tabel pada taraf signifikan 5%. Uji validitas ini dilakukan peneliti dengan program *SPSS vesir.23.0*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengujian telah cocok apabila dilakukan dua kali atau lebih dari peristiwa yang sama. Uji ini hanya dilakukan pada pertanyaan yang dinyatakan valid dalam uji validitas. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*, dengan bantuan SPSS.

Menurut Ghozali (2011), pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar ($>$) 0.70. Semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengujian suatu pertanyaan. Semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti isi pertanyaan dalam koefisien semakin reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, maka data terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal.

Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinieritas ini dilakukan agar peneliti mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lainnya dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya adalah yang tidak terjadi korelasi di antara variabel – variabel bebas. Cara untuk mengetahui atau mendeteksi adanya uji multikolinieritas dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* lebih tinggi dari 0.10 (di atas 0.10) dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10 (dibawah 10) maka dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji atau mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu model yang

terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas.

Cara menganalisisnya adalah Jika pola gambar scatterplot model tersebut :

- a) Titik-titik data yang menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data yang tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- c) Penyebaran titik - titik data yang tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik - titik data sebaiknya tidak berpola.

3) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi tujuannya untuk memperkirakan atau meramalkan nilai dari satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. Sedangkan regresi linear berganda adalah dimana regresi variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan dengan lebih dari satu variabel bebas tetapi masih menunjukkan diagram hubungan yang linear.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, untuk mengetahui hubungan positif maupun negatif dari variabel – variabel *independent* terhadap variabel *dependent*, maka peneliti menggunakan regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas informasi laporan keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi berganda

- X_1 = Penerapan standar akuntansi pemerintah
 X_2 = Kompetensi Aparatur
 X_3 = peran audit internal
 e = Error

4) Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas (penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal) terhadap variabel terikat (kualitas informasi laporan keuangan) dengan rumus:

$$t = \frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - (r_{xy})^2}}$$

Keterangan :

r_{xy} : korelasi xy yang ditemukan

n : jumlah sampel

t : t_{hitung} yang selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel t_{tabel} dengan taraf signifikan 5% uji dua buah pihak dan $dk = n-2$

Dengan kriteria :

- 1) Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikan $>$ dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.
- 2) Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikan $<$ dari 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

b. Uji Hipotesis Serempak (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal secara bersama-sama terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 diterima yang berarti variabel independen secara bersama - sama mempengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel - variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel - variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Perlengkapan Aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.
- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/ data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi dan misi dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi sumatera utara adalah sebagai berikut:

1) Visi

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

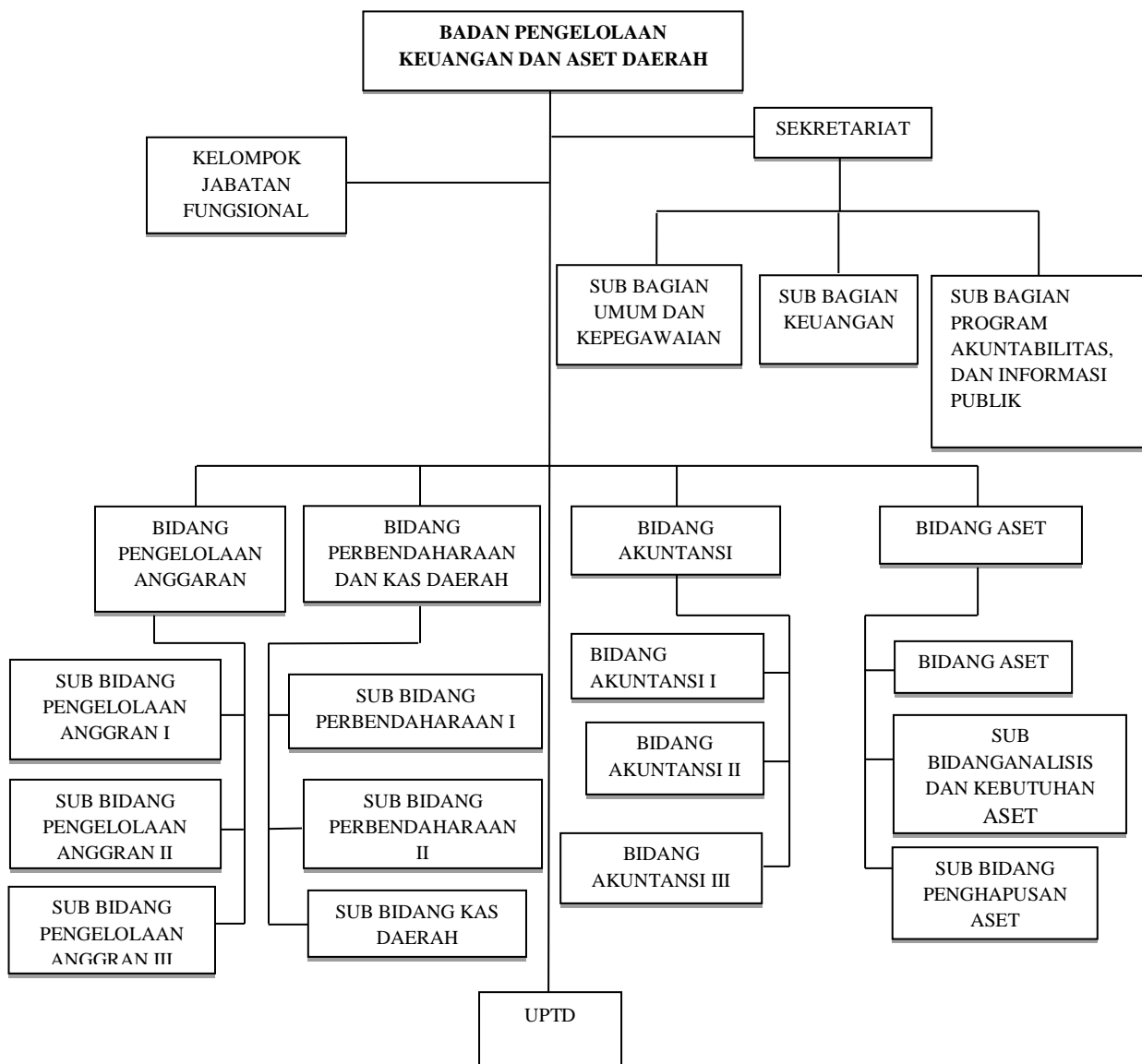
2) Misi

- a) Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- c) Mewujudkan sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berbasis teknologi informasi.

c. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi Sumatera utara merupakan tipe A, maka struktur BPKAD adalah sebagai berikut:



Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara, 2018

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD

d. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset.
- 2) Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai uraian tugas, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah.
- 2) Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- 4) Menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- 5) Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 6) Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 7) Menyelenggarakan penetapan SPD.
- 8) Menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 9) Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 10) Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah.
- 11) Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- 12) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan unit kerja agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.

- 13) Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program – program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Badan melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Pengelolaan Anggaran
- 3) Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah
- 4) Bidang Akuntansi
- 5) Bidang Aset
- 6) Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak
- 7) Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I
- 8) Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II

2. Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

a. Pengujian Validitas

Syarat minimum untuk memenuhi syarat apakah setiap pertanyaan valid atau, tidak yaitu dengan cara membandingkan dengan $r\text{-tabel} = 0.30$. Apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.30 maka butir dalam pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Sebaliknya jika $r\text{-hitung} >$ dari $r\text{-tabel}$ maka dinyatakan valid.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pertanyaan	Korelasi (r-hitung)	r-tabel	Keterangan
1.	Penerapan Standar Akuntansi pemerintah (X ₁)	Butir 1	0.512	0.30	Valid
		Butir 2	0.627	0.30	Valid
		Butir 3	0.551	0.30	Valid
		Butir 4	0.468	0.30	Valid
		Butir 5	0.599	0.30	Valid
		Butir 6	0.591	0.30	Valid
2.	Kompetensi Aparatur (X ₂)	Butir 1	0.592	0.30	Valid
		Butir 2	0.613	0.30	Valid
		Butir 3	0.557	0.30	Valid
		Butir 4	0.429	0.30	Valid
		Butir 5	0.717	0.30	Valid
3.	Peran Audit Internal (X ₃)	Butir 1	0.612	0.30	Valid
		Butir 2	0.548	0.30	Valid
		Butir 3	0.646	0.30	Valid
		Butir 4	0.512	0.30	Valid
		Butir 5	0.544	0.30	Valid

4.	Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	Butir 1	0.658	0.30	Valid
		Butir 2	0.624	0.30	Valid
		Butir 3	0.603	0.30	Valid
		Butir 4	0.706	0.30	Valid
		Butir 5	0.501	0.30	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan maupun pernyataan dinyatakan valid. Dari uji tersebut ternyata koefisien korelasi semua butir lebih besar dibandingkan dengan r-tabel yaitu 0.30 sehingga seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid serta dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

b. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya. Dengan kata lain, untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab butir-butir yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun dalam suatu bentuk kuisisioner. Reliabilitas suatu variabel dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai *Cronbach's alpha* yang lebih besar (>) 0.6.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah(X_1)	0.717	0.60	Reliabel

Kompetensi Aparatur (X ₂)	0.720	0.60	Reliabel
Peran Audit Internal(X ₃)	0.717	0.60	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan(Y)	0.741	0.60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) nilai reliabilitasnya sebesar 0.717, Kompetensi Aparatur (X₂) nilai reliabilitasnya sebesar 0.720, Peran Audit Internal (X₃) nilai reliabilitasnya sebesar 0.717, dan untuk Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) nilai reliabilitasnya sebesar 0.741. Melihat masing-masing nilai reliabilitas diatas menunjukkan reliabilitas yang cukup memadai.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki data yang terdistribusi normal. Data yang normal adalah keharusan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Uji normalitas data untuk penelitian ini menggunakan uji *One Sampel Komogorov-Smirnov Test*.

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,39455462

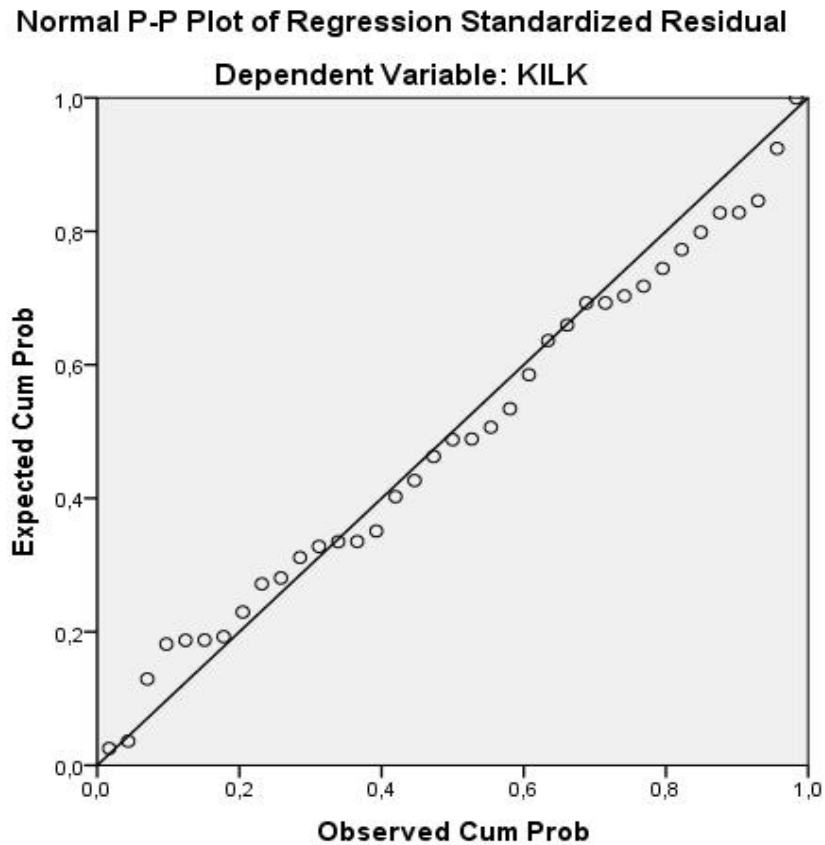
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,090
Kolmogorov – Smirnov Z		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig* bernilai 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Dari hasil pengolahan data menghasilkan pula sebuah grafik *P-P Plot*. Hasil garfik ini juga dapat berguna untuk membuktikan bahwa data memiliki distribusi normal.

Gambar 4.2 Uji Normalitas Data



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan grafik normal *P-P Plot* pada gambar diatas, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya juga mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*). Ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam sebuah model regresi dapat dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai toleransi (*tolerance*). Apabila nilai *tolerance* ($>$) 0.10 dan nilai VIF ($<$) 10 maka disimpulkan terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,732	1,366
	Kompetensi Aparatur	,872	1,147
	Peran Audit Internal	,763	1,311
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan			

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal lebih besar dari ($>$) 0.10 yaitu 0.732, 0.872 dan 0.763. Sedangkan untuk nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari ($<$) 10 yaitu 1.366, 1.147 dan 1.311. Hal ini mengidentifikasi bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel *independent* pada penelitian ini.

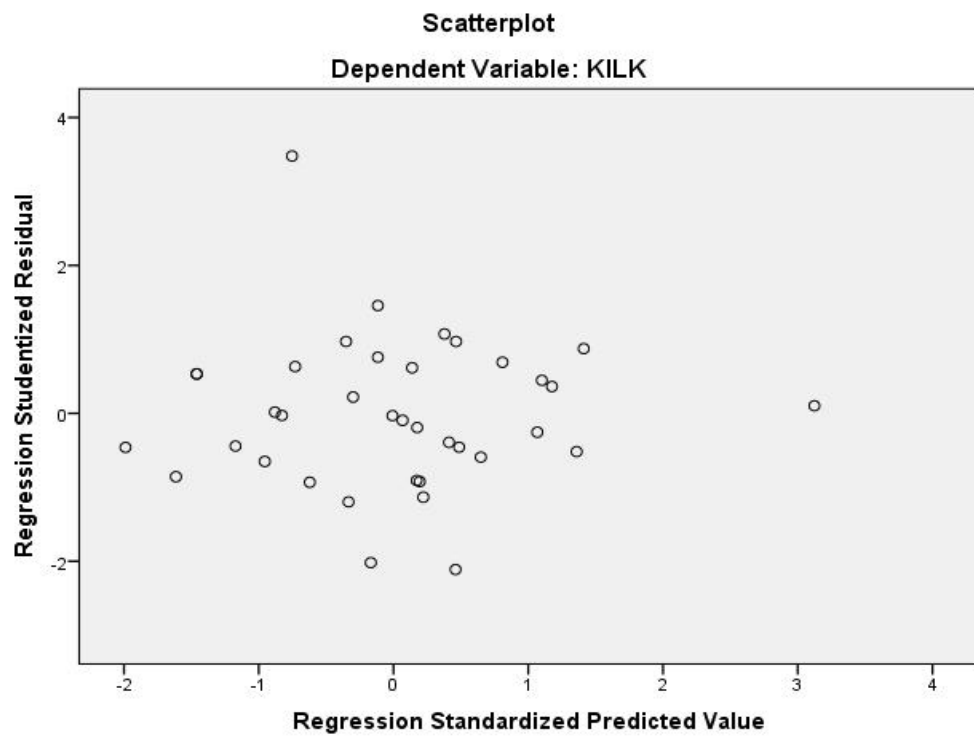
c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas.

Untuk mengetahui terjadi atau tidak heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, dapat digunakan metode grafik plot antara lain prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau sekitar angka 0. Titik-titik tersebut tidak mengumpul hanya di satu bagian saja. Penyebaran titik-titik juga tidak berpola. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat secara masing-masing. Hipotesis diterima jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dan hipotesisnya ditolak jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.5 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,384	4,178		,092	,927
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,225	,146	,235	1,537	,134
	Kompetensi Aparatur	,289	,160	,253	1,805	,080
	Peran Audit Internal	,421	,168	,375	2,506	,017
a. Dependent Variabel : Kualitas Informasi Laporan Keuangan						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

- 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memperoleh nilai sig. Sebesar 0,134 > 0,05 dan nilai t_{hitung} 1,537 < t_{tabel} 2,035, sehingga secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kompetensi Aparatur memperoleh nilai sig. Sebesar 0,080 > 0,05 dan

nilai $-t_{hitung} 1,805 < t_{tabel} 2,035$, sehingga secara parsial Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Peran Audit Internal memperoleh nilai sig. Sebesar $0,017 < 0,05$ dan nilai $-t_{hitung} 2,506 > t_{tabel} 2,035$, sehingga secara parsial Peran Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

a. Uji Hipotesis Serempak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dan terikat secara bersama-sama. Apabila nilai signifikansi 0,05 berarti variabel bebas secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.6 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53,880	3	17,960	8,465	,000 ^b
	Residual	70,012	33	2,122		
	Total	123,892	36			
a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pran Audit Internal, Kompetensi Aparatur, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah						

Sumber : Hasil Pengolahan DataSPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X_1, X_2 dan X_3 secara simultan terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 8,465 >$ nilai $F_{tabel} 2,92$. Sehingga penulis menarik kesimpulan secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil analisisnya :

Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,659 ^a	,435	,384	1,45656
a. Predictors: (Constant), Peran Audit Internal, Kompetensi Aparatur, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah				
b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui nilai Adjusted R square sebesar 0,384 atau 38,4%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 38,4% variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Sedangkan sisanya 61,6% bisa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui pola atau bentuk pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama, dengan menggunakan rumus Regresi Linear Berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kualitas informasi laporan keuangan
 a = Konstanta
 b = Koefisien regresi berganda
 X₁ = Penerapan standar akuntansi pemerintah
 X₂ = Kompetensi Aparatur
 X₃ = peran audit internal
 e = Error

Berikut hasil koefisien regresi berganda secara simultan dengan menggunakan bantuan program SPSS:

Tabel 4.8 Koefisien Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,384	4,178	,092	,927
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	,225	,146	1,537	,134
	Kompetensi	,289	,160	1,805	,080

	Aparatur				
	Peran Audit Internal	,421	,168	2,506	,017
a. Dependent Variabel : Kualitas Informasi Laporan Keuangan					

Sumber : Hasil Olahan SPSS, Penulis 2018

Berdasarkan tabel, diketahui persamaan regresi berganda dari nilai-nilai diatas yaitu :

$$a = 0,384$$

$$X_1 = 0,225$$

$$X_2 = 0,289$$

$$X_3 = 0,421$$

Persamaan regresi berganda dari nilai-nilai diatas adalah:

$$Y = 0,384 + 0,225X_1 + 0,289X_2 + 0,421X_3$$

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas tersebut diketahui bahwa :

1. Konstanta sebesar 0,384 menunjukkan bahwa jika Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal meningkat maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 0,384.
2. Koefisien regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,225 menunjukkan bahwa setiap PSAP naik 1% maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 0,225. Koefisien bernilai positif artinya

terjadi hubungan positif antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

3. Koefisien regresi Kompetensi Aparatur sebesar 0,289 menunjukkan bahwa setiap KA naik 1% maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 0,289. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kompetensi Aparatur dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.
4. Koefisien regresi Peran Audit Internal sebesar 0,421 menunjukkan bahwa setiap PAI naik 1% maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 0,421. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Peran Audit Internal dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

B. Pembahasan

Pembahasan peneliti tentang hasil dari pengujian secara parsial dan simultan:

1. Dari hasil pengujian variabel X_1 secara parsial diketahui bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,134) yang $>$ dari 0,05. Selain itu penelitian ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang menyatakan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang

berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. Dan hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, seperti Kusumah (2012) dan Nugraheni dan Subaweh (2008), di mana hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota dipengaruhi oleh SAP. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

2. Dari hasil pengujian variabel X_2 secara parsial diketahui bahwa variabel Kompetensi Aparatur (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,080) yang $>$ dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Moeheriono (2009) mengungkapkan “Kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Dan hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian sebelumnya seperti Indriasari (2008) dalam Sukmaningrum (2012) membuktikan kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap keterpatuan dan keterandalan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah dan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia

berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

3. Dari hasil pengujian variabel X_3 secara parsial diketahui bahwa variabel Peran Audit Internal (X_3) memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,017) yang $<$ dari 0,05. Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan Sukrisno Agoes (2013) Audit Internal merupakan pemeriksa yang dilakukan secara sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Sari dan Raharja (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Dari hasil pengujian secara simultan, Penerapan Standar Akuntansi, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal menunjukkan pengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar (0,000) $<$ dari 0,05 dan nilai $F_{hitung} 8,465 >$ dari nilai $F_{tabel} 2,92$.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil data yang telah dibahas pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, maka hipotesis 1 yang diajukan ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai $-t_{hitung}$ 1,537 dengan nilai signifikan sebesar 0,134.
2. Kompetensi aparatur secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, maka hipotesis 2 yang diajukan ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai $-t_{hitung}$ 1,805 dengan nilai signifikan sebesar 0,080.
3. Peran audit internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, maka hipotesis 3 yang diajukan diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai $-t_{hitung}$ 2,506 dengan nilai signifikan sebesar 0,017.
4. Penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara, maka hipotesis 4 yang diajukan diterima. Hal ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} 8,465 dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

5. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 38,4%. Sedangkan 61,6% lagi dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambah beberapa variabel independen atau variabel dependen.
2. Bagi penelitian selanjutnya untuk mencoba menggunakan sampel yang lebih luas (pada BPKAD Provinsi lain) dengan jumlah responden lebih banyak untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih utuh mengenai pengelolaan keuangan di BPKAD.
3. Peneliti berharap agar tidak terjadi keterlambatan dalam menyusun laporan keuangan.
4. Peneliti berharap kompetensi aparatur dapat dijalankan dengan baik dan tetap menjaga kedisiplinan pada saat berkerja.
5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tempat penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- "Adiman, S., & Junawan, J. (2020). *The Impact Of The Covid 19 Pandemic On The Indonesian Trade Sector. International Proceeding of Law and Economic*, 57-61."
- Amilin, 2010, Analisis Dampak Karakteristik Personal, Pengalaman Audit, Dan Independensi Akuntan Publik Terhadap Penerapan Etika Akuntan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit (*Survey Terhadap Para Akuntan Publik Di Indonesia*) Bandung.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi. Tesis Maksi UGM, Yogyakarta.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.
- Fauzi, Rizky. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Background Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Balai Diklat Keuangan Medan. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan Forward Contract Hedging pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- Kiranayanti dan Erawati (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Udayana Bali. E-Jurnal Vol. 16. No. 2 Agustus 2016.

- Kusumah, A.A. (2012), "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)" *Jurnal Akuntansi*.
- Lamonisi, Sony. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016*.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press*.
- Manullang, M., & Pakpahan, M. 2014 *Metodologi Penelitian*. Bandung: Ciptapustaka media.
- N, Wahida. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. Universitas Hasanuddin.
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Kepangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Panggabean, F. Y. (2020). Pelatihan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan di SMKN 1 Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(1), 82-87.
- Permadi, Dwi Angga. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat*). Universitas Widyatama Bandung.

- Rahayu Kurnia Siti Dan Ely Suhayati, 2009, *Auditing Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Rizkina, M., & Junawan, J. (2020). *Decline In Profits During The Covid-19 Pandemic On Expedition Of PT. KARYA MAKMUR MEDAN. International Proceeding of Law and Economic*, 51-56.
- Rusiadi, (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus Dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.*
- Sari P.M Dan Raharja, (2011). “Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) Di Indonesia
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Wardoyo, Trimanto S dan Lena, 2010, Penerapan Audit Internal Dalam Menunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance (studi kasus PT. Dirgantara Indonesia), *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Windiastruti, Ruri. (2013). Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung*). Universitas Widyatama Bandung.
- Yuliani, S. 2010 Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*.
- Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.
- Zeyn. E, (2011). “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi”. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<http://bpkad.sumutprov.go.id>